



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUSLIM MAHARDIKA  
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
3. NHK : 1008912

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.300.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.224 m2/800 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 254 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000		
4. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>58.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>50.900.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>643.774.526</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.052.674.526</b>



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.052.674.526

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.